

## Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara

Muhammad Anang Tripasca<sup>1\*</sup>, Iqram Rosadi<sup>2</sup>, Ahlil Nur Firdaus<sup>3</sup>, Widyastuti<sup>4</sup>,  
Maritza Zukhrufa Allayna<sup>5</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia<sup>1, 2, 3, 4, 5</sup>

Email: anangtripasca39@gmail.com<sup>1\*</sup>, iqramrosadi07@gmail.com<sup>2</sup>,

22ahlilnurfirdaus@gmail.com<sup>3</sup>, widyastuti2901@gmail.com<sup>4</sup>, mzukhrufa@gmail.com<sup>5</sup>

### Artikel info

#### Artikel history

Diterima : 03-07-2022

Direvisi : 14-08-2022

Disetujui : 25-08-2022

**Kata Kunci:** efektivitas;  
kinerja; penanggulangan resiko  
bencana

**Keywords:** effectiveness;  
performance; disaster risk  
management

#### Abstrak

Penanganan masalah sosial lintas sektoral, seperti bencana, memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Banyak contoh yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dapat berfungsi dengan baik asalkan cukup ruang bagi pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi, termasuk masyarakat sebagai objek dan subjek pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang efisiensi kinerja BPBD Provinsi dalam pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi, dan studi pustaka digunakan untuk memperoleh data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sudah efektif, terbukti dengan kesiapsiagaan badan dalam menghadapi setiap bencana yang terjadi, dukungan Sumber Daya Manusia yang kompeten, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang membantu dalam manajemen Bencana. Meskipun pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kelembagaan, kondisi lingkungan, dan kebijakan serta praktik pengelolaan termasuk di antara beberapa faktor penghambat.

#### Abstract

Handling cross-sectoral social problems, such as disasters, requires the involvement of many stakeholders. Many examples show that the government's capacity to reduce disaster risk can function well as long as there is enough space for other stakeholders to participate, including the community as the object and subject of actors. The purpose of this study was to obtain a descriptive picture of the efficiency of the performance of the Provincial BPBD in disaster risk reduction in Southeast Sulawesi using qualitative descriptive techniques. Interviews, observations, and literature studies were used to obtain data. Research findings indicate that the services provided by the BPBD of Southeast Sulawesi Province have been effective, as evidenced by the agency's preparedness in dealing with any disasters that occur, the support of competent Human Resources, and the availability of facilities and infrastructure that assist in disaster management. Although the services provided by the Regional Disaster Management Agency of Southeast Sulawesi Province have been running well, there are still obstacles in their implementation. Institutions, environmental conditions, and management policies and practices are among some of the inhibiting factors.

**Koresponden author: Muhammad Anang Tripasca**

Email: mutiaalifa908@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



## Pendahuluan

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang terdiri dari semenanjung dan pulau-pulau dengan keanekaragaman hayati yang melimpah ([Tan & Nawawi, 2021](#)), mulai dari yang terbarukan (*renewable*) hingga yang tidak terbarukan (*non-renewable*) di sektor kelautan dan kehutanan, serta pertambangan. Provinsi Sulawesi Tenggara juga menawarkan berbagai wisata alam yang indah, salah satunya Taman Nasional Wakatobi yang terletak di Pulau Wakatobi yang dikenal sebagai surga di bawah laut dalam segitiga karang dunia, dengan 750 jenis karang dari 850 jenisnya. Hutan Lambusango yang terletak di Kabupaten Buton juga menyimpan banyak sekali hasil jutan yang menawan, termasuk tumbuhan asli. dan satwa liar, serta Anoa.

Terdapat berbagai kemungkinan bencana yang mengintai di balik keindahan dan sumber daya alam Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami 8 jenis bencana yang berbeda antara tahun 1999 dan 2015, diantaranya adalah banjir, banjir bandang, kekeringan, perubahan cuaca yang signifikan, gelombang tinggi dan erosi pantai, gempa, kegagalan teknologi, dan tanah longsor. Bencana tersebut berdampak besar bagi masyarakat baik kerugian materil maupun non materil ([Rachmat & Pamungkas, 2014](#)). Pemerintah harus memperhatikan situasi ini untuk menilai tingkat dampak bencana.

Banjir sering terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kota Kendari menjadi salah satu korban banjir setiap tahunnya ([Setiadi et al., 2021](#)). Banjir di Kota Kendari tidak hanya disebabkan oleh hujan lebat yang menyebabkan puluhan sungai meluap, tetapi juga oleh tata ruang kota yang kurang berwawasan lingkungan atau ekologis. Kota Kendari terletak di tepi Sungai Wanggu dan Teluk Kendari, dan hampir semua daerah tangkapan air telah berubah fungsi akibat pemadatan ruko, perumahan, dan investasi swasta.

Hutan di sekitar Sungai Wanggu juga kian terkikis, begitu pula di daerah sekitar Teluk Kendari, hanya tersisa sekitar 10% Kawasan Hutan Mangrove. Bencana lain yang berpotensi menimbulkan DIBI antara lain banjir bandang, kekeringan, cuaca buruk, serta gelombang tinggi dan erosi pantai, tercatat pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara ([Bachtiar et al., 2021](#)). Semua bencana ini mengakibatkan kerugian baik kecil maupun besar. Tingkat risiko regional yang signifikan akan berasal dari tingkat kerawanan dan kemungkinan bahaya yang tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penanganan masalah sosial lintas sektoral, seperti bencana, memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan ([Rahman, 2016](#)). Banyak contoh yang menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dapat berfungsi dengan baik asalkan cukup ruang bagi pemangku kepentingan lain untuk berpartisipasi, termasuk masyarakat sebagai objek dan subjek pelaku. Paradigma Mitigasi adalah paradigma baru yang muncul berikutnya, yang lebih berfokus pada kegiatan identifikasi titik rawan bencana, mengidentifikasi pola-pola penyebab kerentanan, serta melaksanakan upaya mitigasi meliputi baik struktural (pembangunan gedung) maupun non-struktural (penataan ruang dan standar bangunan) ([Danuwikarsa, 2013](#)).

Lebih lanjut, pendekatan baru dalam Penanggulangan Bencana, yang juga dikenal sebagai paradigma pembangunan, berkembang lagi, yang mengarah pada keprihatinan kerentanan di masyarakat. Inisiatif-inisiatif tersebut sebagian besar difokuskan pada pengintegrasian manajemen bencana melalui rencana pembangunan. Seperti, pertumbuhan

ekonomi, kemajuan teknologi, penurunan tingkat kemiskinan, dan lain masalah lainnya. Pendekatan baru terakhir adalah pendekatan pengurangan risiko. Metode perencanaan mitigasi bencana ini menggabungkan perspektif teknis dan ilmiah sambil juga mempertimbangkan masalah sosial dan ekonomi, serta politik (Noor, 2014).

Pendekatan penanggulangan bencana ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengendalikan dan meminimalkan risiko bencana. Aspek yang paling krusial dari strategi tersebut adalah memperlakukan masyarakat sebagai topik daripada objek penanggulangan bencana selama fase pembangunan. BNPB Provinsi Sulawesi Tenggara yang didirikan dengan Keputusan Presiden No. 8 Thn. 2008 adalah organisasi non departemen yang terdiri dari BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab dan lingkup kerja yang berhubungan. Penanggulangan risiko bencana merupakan salah satu tugas BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Widayati, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Thn. 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana yaitu suatu kejadian yang dianggap mengganggu dan membahayakan hidup masyarakat karena kekuatan alam dan manusia, yang mengakibatkan hilangnya nyawa, harta benda korban hilang, dan korban mengalami trauma psikologis (Cecilia, 2022). Berikut adalah tujuan penanggulangan bencana menurut undang-undang yaitu memberikan perlindungan bencana kepada masyarakat. Menghubungkan hukum dan peraturan yang relevan saat ini. Memastikan bahwa tanggap darurat berjalan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan lengkap. Mendorong Kerjasama dan kolaborasi antar sektor khususnya di sektor publik. Menumbuhkan semangat partisipasi dan persahabatan. Membawa kedamaian bagi masyarakat, korporasi bangsa, dan juga negara.

BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara hadir sebagai bentuk pengabdian pemerintah dalam merespons bencana dan kesulitan penanggulangan bencana di wilayah Sulawesi Tenggara. Penulis akan menilai kinerja BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka dari itu, penulis menuangkannya ke dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang efisiensi kinerja BPBD Provinsi dalam pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tenggara.

## **Metode Penelitian**

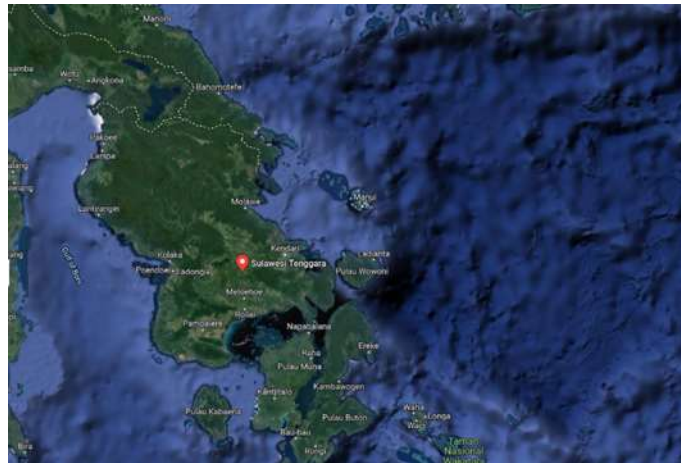
Kajian ini difokuskan pada evaluasi efisiensi kinerja tanggap darurat daerah dalam mitigasi bencana di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk sekedar mendapatkan data yang berdasarkan fakta dan dapat dipercaya kebenarannya.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Tenggara**

Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia pada bagian tenggara perairan Sulawesi seluas 38.067,70 km<sup>2</sup>. Kendari ditetapkan sebagai ibu kotanya. Provinsi Sulawesi Tenggara berlokasi di Semenanjung Tenggara pulau Sulawesi, berdasarkan posisinya Sulawesi Tenggara terletak diantara 02°45' hingga 06°15' LS dan diantara 120°45'

hingga 124°30' BT, dengan daratan sebesar 38.140 km<sup>2</sup> (3.814.000 hektar) dan saluran air (laut) seluas 110.000 km<sup>2</sup>, (11.000.000 hektar).



**Gambar 1. Peta Provinsi Sulawesi Tenggara**

Sumber: Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, 2022

Perpu No. 2 diterbitkan pada tahun 1964. Sulawesi Tenggara dinyatakan sebagai daerah otonom dengan Undang-undang Juncto No. 13 Tahun 1964. Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang luas dengan berbagai hasil pertambangan, seperti semen dan nikel, serta mineral lainnya. Tidak hanya itu, ada beberapa potensi untuk mengembangkan lahan pertanian. Ada juga berbagai hasil hutan yang dapat diakses, termasuk bambu, damar, dan beberapa hasil hutan lainnya.

## **B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara**

BPBD Provinsi Tenggara merupakan komponen kunci dari peran Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang penanggulangan bencana (Resty, 2018). Salah satu tanggung jawab BPBD Provinsi adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan teknis dengan bertindak cepat, tepat, profesional, dan efisien di bidang penanganan bencana dan penanganan pengungsi.

BPBD Provinsi mempunyai tanggung jawab menurut Perda Nomor 3 Tahun 2009 tmengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu menetapkan panduan dan instruksi yang adil dan merata untuk upaya penanggulangan bencana, seperti perencanaan darurat, tanggap bencana, rehabilitasi, dan pembangunan Kembali. Menetapkan persyaratan untuk harmonisasi dan kinerja kebutuhan respons. Menyiapkan, menentukan, dan mengkonfirmasi denah bahaya bencana. Mengembangkan dan menetapkan Langkah-langkah penanganan bencana yang permanen, melakukan kegiatan penanganan bencana. Dalam keadaan normal, melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana sebulan sekali kepada Kepala Daerah, dalam keadaan darurat bencana, melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan. Mengawasi pengumpulan serta pendistribusian logistik penggunaan uang dari APBN. Memenuhi tanggungjawab lain yang telah ditetapkan.

## **C. Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara**

Tingkat efektivitas suatu lembaga, menurut (Tasya et al., 2017) mengacu pada tingkat efektivitas lembaga tingkat jauh dalam menjalankan operasional dan fungsinya, sehingga dapat memenuhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan dengan menggunakan sarana dan prasarana disediakan secara efisien. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, suatu lembaga dapat dikatakan efektif (Wismanawati & Permana, 2013):

1. Pencapaian tujuan, khususnya seluruh upaya untuk mencapai tujuan, harus dipahami sebagai suatu proses. Proses penentuan tujuan yang diinginkan suatu lembaga harus memiliki aspek SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound*). Sub indikator dengan hasil yang terukur dan target yang merupakan target konkrit, memiliki sumber daya pendukung, dan memiliki jangka waktu tertentu merupakan pencapaian tujuan.
2. Integrasi, yang berkaitan dengan proses sosialisasi dan komunikasi, serta menilai kemampuan organisasi untuk melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan organisasi yang berbeda.
3. Adaptasi, yang mengacu pada kemampuan organisasi untuk merespon perubahan di lingkungannya.

Fokus penelitian ini adalah untuk menilai efisiensi upaya BPBD Provinsi dalam mengurangi risiko bencana, khususnya di Sulawesi Tenggara. Penulis mencoba menjelaskan fokus yang diamati dalam situasi ini dengan membandingkan kondisi lapangan dengan teori yang ada sebagai berikut:

#### 1. Produktivitas Kinerja Aparat

Efektivitas kinerja penanggulangan bencana pemerintah daerah sangat penting dalam mencapai tujuan Lembaga. SDM sangat krusial pengaruhnya terhadap produktivitas pelayanan suatu institusi. Sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas dapat menangani bencana secara cepat, tepat, dan aman.

Berdasarkan uraian sebelumnya serta hasil observasi dan wawancara penulis, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan lembaga BPBD Provinsi dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan bencana cukup memuaskan.

#### 2. Kualitas Layanan yang Diberikan

BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan pelayanan yang sangat baik, menunjukkan bahwa kinerja aparaturnya dalam penanggulangan bencana cukup tinggi. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam permasalahan yang dihadapi menjadi salah satu hal yang menyebabkan protes dari masyarakat itu sendiri.

Tinggi rendahnya kepuasan konsumen jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat BPBD Provinsi dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang ditawarkan. Menurut pengamatan dan wawancara penulis, pelayanan yang ditawarkan umumnya baik, namun masih ada protes kecil dari lingkungan sekitar.

#### 3. Responsivitas Aparat

Daya tanggap diartikan sebagai kemampuan aparaturnya organisasi dalam menilai kebutuhan korban, merumuskan jadwal dan tujuan pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, terlihat jelas bahwa pelayanan di BPBD Provinsi telah dilaksanakan dengan responsif. Hal ini terlihat dari upaya aparat

BPBD Provinsi untuk mengakomodir dan mengevaluasi berbagai permasalahan yang muncul, dengan pimpinan dan staf memberikan jawaban.

#### 4. Responsibilitas

Keberhasilan kinerja aparatur dalam kegiatan penanganan bencana di instansi BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam aspek pengaruh, memotivasi, dan memberikan informasi seperti yang disampaikan dalam penelitian ([Lian](#), 2017). Tingkat tanggung jawab pelayanan pada instansi BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara sudah baik, menurut hasil observasi dan wawancara penulis.

### **D. Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara**

#### 1. Karakteristik Lembaga

Karakteristik suatu lembaga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya pencapaian tujuan Lembaga ([Pratama](#), 2019). Alokasi kewenangan sesuai kebijakan gubernur merupakan salah satu karakteristik lembaga yang berdampak pada efektifitas pelayanan. Pembagian tugas dan wewenang tersebut didasarkan pada tanggung jawab dan tujuan utama dari setiap bidang yang ada

#### 2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan dipisahkan menjadi dua kategori dalam hal ini lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Lingkungan intern meliputi atribut-atribut lingkungan institusi dan dalam lingkup institusi. Lingkungan ekstern adalah lingkungan di luar batas institusi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap organisasi, khususnya dalam pengambilan keputusan.

#### 3. Karakteristik Aparat

Karakteristik aparat atau pekerja adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan ([Amalo](#), 2019). Pekerja merupakan aset penting dalam sebuah lembaga. Setiap individu pasti memiliki perbedaan dengan individu lainnya, maka dari itu kesadaran tiap individu sangat dibutuhkan dalam upaya pencapaian tujuan lembaga. Aspirasi individu harus dapat diintegrasikan dengan tujuan kelembagaan agar suatu lembaga dapat berhasil.

#### 4. Karakteristik Kebijakan dan Praktik Manajemen

Karakteristik manajemen adalah strategi dan prosedur kerja yang mengkondisikan segala sesuatu dalam suatu institusi untuk ditangani secara cepat, tepat, aman, berhasil, dan efisien.

Kebijakan praktik manajemen merupakan sarana pengarahan semua kegiatan menuju tujuan lembaga, yang dimaksud yaitu tujuan BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemimpin atau manajer memegang otoritas dan kendali paling besar atas aturan, proses, dan tindakan yang memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

### **Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara berdasarkan temuan penelitian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dalam upaya pengurangan resiko bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara sudah efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan produktivitas kinerja aparat yang kompeten, kualitas pelayanan yang memuaskan dan responsivitas aparat yang mampu mengenali kebutuhan korban dengan sigap. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPBD Provinsi tergolong lengkap. Terdapat beberapa kendaraan operasional yang jarang terpakai sehingga mengakibatkan kerusakan, tetapi pihak BPBD Provinsi selalu melakukan pengecekan berkala untuk mengecek kesiapan segala sarana dan prasarana agar siap digunakan apabila terjadi bencana. Berdasarkan Sumber Daya Manusia (pegawai) yang ada pada BPBD Provinsi sudah memiliki kinerja cukup baik dan kompeten walau masih terbatas jumlahnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan karyawan dalam menangani setiap bencana yang mungkin terjadi.

Faktor penghambat efektivitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana di Wilayah Sulawesi Tenggara antara lain yaitu kurangnya personil dalam penanggulangan bencana dan masyarakat yang beranggapan jika penanggulangan bencana hanyalah tanggungjawab BPBD Provinsi padahal harus adanya kontribusi dari masyarakat untuk bekerja sama.

## Bibliografi

- Amalo, C. V. (2019). Soda Molek: Efektifitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Naikoten II Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(2), 17–29. <https://doi.org/10.37182/jik.v2i4.39>
- Bachtiar, E., Duwila, A. A., Chaerul, M., Affandy, N. A., Makbul, R., Tanjung, R., Purba, B., Saidah, H., Sutrisno, E., & Sari, M. (2021). *Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan*. Yayasan Kita Menulis.
- Cecilia, A. L. (2022). Peran JRO Mangku Sebagai Opinion Leader Dalam Komunikasi Kebencanaan Gunung Agung Di Amertabhuana, Karangasem, Bali. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jsht.v4i2.221>
- Danuwikarsa, I. (2013). Peran Perguruan Tinggi Melalui Penelitian Dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v3i1.44>
- Lian, B. (2017). *Kepemimpinan dan Kualitas Kinerja Pegawai*. Palembang: CV. Amanah.
- Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Deepublish.
- Pratama, S. (2019). Analisa pengaruh sumberdaya manusia, prasarana dan lingkungan kerja terhadap kinerja studi pada pegawai universitas pembangunan panca budi medan. *Jumant*, 11(1), 235–250.
- Rachmat, A. R., & Pamungkas, A. (2014). Faktor-Faktor kerentanan yang berpengaruh terhadap bencana banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C178–C183. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7263>
- Rahman, A. (2016). Peran taruna siaga bencana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Serang dan Sukabumi. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 56–74. <https://doi.org/10.33007/ska.v6i1.311>
- Resty, A. A. (2018). Dinamika Diplomasi Bencana Melalui Pendekatan Paradiplomasi oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1867>
- Setiadi, D., Qayim, I., & Guhardja, E. (2021). *Mangrove: Karakteristik Ekosistemnya pada Pulau-pulau Kecil*. Penerbit NEM.
- Tan, N., & Nawawi, M. T. (2021). Pengaruh Manajemen Pengetahuan, Kompetensi, Dan Pengalaman Kerja Dengan Motivasi Kerja Sebagai Mediasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Jakarta Utara. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(4), 1127–1136.
- Tasya, S. C., Fuad, A., & Widyastuti, Y. (2017). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Widayati, R. S. (2020). Studi Kajian Peran BPBD dan Aisyiyah Disaster Action dalam Upaya



Pengurangan Resiko Bencana di Surakarta. *Gaster*, 18(1), 108–118.  
<https://doi.org/10.30787/gaster.v18i1.549>

Wismanawati, R. T., & Permana, A. (2013). Efektivitas Sanksi Administratif Keterlambatan Pengembalian Bahan Pustaka Terhadap Kedisiplinan Pemustaka Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 96–109.